

## IMPLEMENTASI *E – OFFICE* SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

**Anggi Pratama Nasution, S.E, M.Si**

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

**Ikhah Malikhah, S.E., M.M**

Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana penerapan e-office dalam meningkatkan nilai Transparansi pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan Untuk menganalisa sejauh mana penerapan e-office dalam meningkatkan nilai Transparansi pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Selanjutnya, jenis penelitian ini bersifat asosiatif dengan melihat implementasi e-office untuk meningkatkan nilai transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan menggunakan kuisioner dibagikan kepada ketua/ kepala pada Program Studi, Biro dan Kepala Urusan di UNPAB dengan menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah 15 Program Studi, 11 Biro, 12 Kepala Urusan. Hasil penelitian ini adalah Peran sistem e-office dalam meningkatkan nilai Transparansi pada Universitas Pembangunan Panca Budi telah tercapai dan Peran sistem e-office dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas pada Universitas Pembangunan Panca Budi telah tercapai.*

**Kata Kunci :** *E-Office, Akuntabilitas, Transparansi.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Pendidikan yang baik (*good governance*), telah menjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi suatu Universitas pada saat ini. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan akan modernisasi administrasi Universitas guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen akademik dan non akademik pada setiap kebutuhan civitas akademika yaitu Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan.

*E-office* merupakan salah aplikasi yang saat ini mulai banyak digunakan dalam sistem administrasi modren. Di Indonesia sendiri penggunaan *e-office* sendiri telah banyak digunakan pada dunia industri, pemerintah dan tak terlepas yaitu lembaga pendidikan. Aplikasi *e-office* adalah suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi yang secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi, di mana data, informasi dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikas dengan tujuan membangun suatu sistem yang mampu mengakomodasi setiap unsur *good corporate governace* (GCG).

Dalam pelaksanaannya, pengguna Sistem Informasi *e-office* ini terdiri dari 4 jenis pengguna, diantaranya adalah : 1. Administrator, yaitu pengguna yang memiliki akses untuk mengelola data member atau pengguna yang lainnya. 2. Operator, yaitu pengguna yang memiliki akses untuk melakukan entri naskah surat, menyampaikan surat dan menerima disposisi. 3. Pejabat Pimpinan/Atasan, yaitu pengguna yang memiliki akses sebagai penerima surat maupun disposisi dari pimpinan di atasnya. 4. Staff, yaitu pengguna yang diberikan wewenang untuk menerima disposisi surat dari pimpinan. Dengan adanya *e-office* diharapkan segala proses akademik dan non akademik di Universitas akan lebih efektif dan efisien dengan salah unsur peningkatan *good corporate governace* (GCG) yang diukur melalui Transparansi dan Akuntabilitas.

Selanjutnya *e-office* dalam fungsi transparansi dan akuntabilitasnya akan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap suatu universitas. Kepercayaan publik yang tinggi nantinya akan juga dapat mendorong adanya partisipasi yang tinggi dengan dukungan dari pihak universitas. Bentuk nyatanya adalah setiap proses aktivitas dari penyelenggaraan pendidikan di

tingkat universitas harus dapat mencerminkan fungsi transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, tujuan akuntabilitas nantinya juga dapat menilai kinerja suatu universitas tersebut dan kepuasan publik terhadap penyelenggaraan akademik yang baik karena telah dilibatkan dalam proses pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan sehingga harapannya akuntabilitas dapat dijadikan salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan *good corporate governace* (GCG) di Universitas.

Secara langsung, Universitas Pembangunan Panca Budi adalah salah satu Universitas yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang saat ini telah menggunakan *e-office* dalam proses akademik dan non akademik pada proses operasionalnya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana selama ini pelaksanaan *e-office* dalam meningkatkan fungsi transparansi dan akuntabilitas universitas pembangunan panca budi.

## II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.2 *E'Office*

"*Electronic office* atau *e-office* yang sering juga diistilahkan dengan otomatisasi perkantoran. Otomatisasi dalam bahasa inggris disebut automation memiliki padanan kata *mechanization* dan *computerization*" (Lernout & Hauspie Speech Products N,V, 1993). Perkantoran merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan (*services*) dalam perolehan, pencatatan, penyimpanan, penganalisaan, dan pengkomunikasian informasi. Cakupan aktivitas perkantoran meliputi kegiatan-kegiatan seperti pencatatan, pembuatan dan pengolahan kata (*word processing*), penyajian atau *display*, pengelompokkan, kalkulasi data (*spreadsheet*), pengelolaan database, melakukan perantaraan, pertemuan, dan penjadwalan (*appointment*), presentasi, korespondensi, dokumentasi, dan lain sebagainya (Stanza, 2010). Otomatisasi perkantoran berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis khususnya komputer. Era otomatisasi perkantoran dimulai bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi, penggunaan perangkat komputer untuk keperluan perkantoran (Waluyo, 2000). Otomatisasi perkantoran tidak bisa dipisahkan dari teknologi perkantoran, sebab otomatisasi merupakan bentuk pengembangan teknologi, dalam hal ini pergeseran dari teknologi manual kepada teknologi otomatis.

Dalam *electronic office*, pegawai mempunyai akses untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan di dalam file komputer miliknya atau milik orang lain, karena dalam *electronic office*, antar komputer dalam suatu perkantoran saling terkoneksi. *Electronic office* atau *e-office* merupakan software dan digunakan untuk mengatur pola pekerjaan yang sudah atau akan dilakukan oleh pegawai, menyimpan dan mengontrol konten-konten yang ada di dalam suatu organisasi secara elektronik. Paparan diatas mengisyaratkan bahwa otomatisasi perkantoran merupakan proses pemilihan dalam teknologi perkantoran. Dengan kata lain, mempertegas definisi sebelumnya, bahwa otomatisasi perkantoran merupakan proses pengalihan metode pencatatan, penghimpunan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan bahan-bahan keterangan dari metode manual yang banyak melibatkan tenaga manusia kepada metode otomatis yang banyak melibatkan operasi mesin otomatis bahkan Komputer.

#### a. *Transparansi*

Transparansi Menurut Tahir (2010:159) Transparansi secara dalam bahasa inggrisnya adalah *transparency yang secara harfiah dapat juga disebut jelas (obvious)*, artinya dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan atau *openes*. Bila dikaitkan dengan aktivitas maka transparansi dapat diartikan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informal kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Dalam konteks *Good Governance*, transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Identik dengan itu, Mardiasmo (2003:30) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Selanjutnya Tjokromidjoyo (2003:123), menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. *Good Governance* tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup. Oleh karena *good governance* tidak membolehkan cara-cara yang tertutup, Gaffar (dalam Rosyada dkk 2003:184), mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) aspek mekanisme pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan secara transparans yaitu sebagai berikut : 1) Penetapan posisi jabatan atau kedudukan; 2) Kekayaan pejabat publik; 3) Pemberian penghargaan; 4) Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan ; 5) Kesehatan; 6) Moralitas para pejabat dan aparatur pelayan publik; 7) Keamanan dan ketertiban; 8) Kebijakan strategi untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Konsep transparansi menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*: *As transparency is a core governance value. The regulatory activities of government constitute one of the main contexts within which transparency must be assured. There is a strong public demand for greater transparency, which is substantially related to the rapid increase in number and influence of non governmental organisations (NGOs) or 'civil society groups', as well as to increasingly well educated and diverse populations (2004 :66).*

Menurutnya bahwa konsep tranparansi adalah merupakan nilai utama dari system pemerintahan. Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakekatnya ada kaitannya dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat. Ini berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat.

Dilain pihak, Smith (2004:66), mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi :

- a. *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- b. *Consultation processes* (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat
- c. *Appeal rights (Permohonan Izin)*, adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

Hidayat (2007:23), mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum. Didalam *Good Governance* (Nugroho, Randi R.W 2004:128), transparansi adalah merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Artinya transparansi disini adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung. Sementara itu dalam <http://www.transparansi.or.id> Jurnal Masyarakat Transparansi mengemukakan bahwa transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Dari berbagai definisi tentang transparansi diatas, terlihat jelas benang merah antara transparansi dengan *good governance*, dimana suatu pemerintahan masuk katagori *Good Governance* manakala pemerintahan tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip tranparansi. Hal

ini dimungkinkan karena prinsip-prinsip *Good Governance* adalah mencakup: Transparansi, Integritas, Akuntabilitas, Tanggung jawab dan Partisipasi.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa transparansi bukan merupakan hal yang baru dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika setiap program kegiatan dikomunikasikan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada dan konsisten melaksanakan secara terbuka dan membangun kohesivitas antara pimpinan dan bawahan serta mengharapkan masukan-masukan sebagai partisipasi dari publik, maka sebenarnya prinsip-prinsip transparansi telah terimplementasi dengan baik.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Ada beberapa pengertian tentang transparansi publik yaitu: Menurut Andrianto (2007) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut :

“Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.”

Menurut Hafiz (2010) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut : “Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah tersebut.

#### a. Akuntabilitas

Akuntabilitas Akuntabilitas itu sendiri menurut Mardiasmo (2006:3) diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas (*accountability*) menurut Suherman (2007) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2004), menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.”

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

- a. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- b. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju *clean government* atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

#### **b. Good University Governance**

Pemerintahan adalah tindakan pemerintahan. Itu berhubungan dengan keputusan yang menentukan harapan, memberikan kekuasaan, atau verifikasi kinerja (Wikipedia). Tata kelola adalah tentang bagaimana organisasi mengarahkan itu sendiri dan proses dan struktur dulu mencapai tujuannya. Pemerintahan juga sangat penting berkaitan dengan bagaimana organisasi berhubungan dengan masing-masing lain dan untuk pemangku kepentingan mereka dan, jika relevan, berurusan dengan bagaimana warga diberi suara (Edwards, M., 2000).

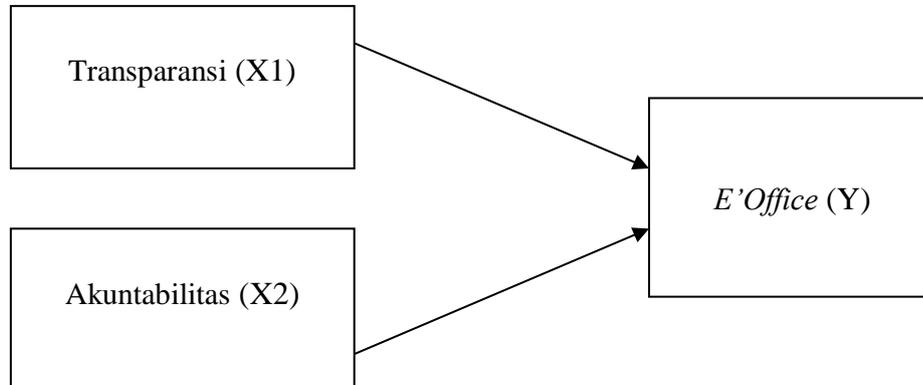
Tata kelola universitas yang baik berarti sebuah fokus pada tujuan organisasi dan pada hasil untuk warga negara dan pengguna layanan, tampil secara efektif dalam fungsi dan peran yang jelas, mempromosikan nilai-nilai untuk seluruh organisasi dan menunjukkan nilai-nilai tata kelola yang baik melalui tingkah laku, mengambil keputusan yang jelas dan transparan serta mengelola risiko, mengembangkan kapasitas dan kapabilitas badan pengatur untuk menjadi efektif, melibatkan para pemangku kepentingan dan menjadikan akuntabilitas nyata (Chartered Institute of Public Accounting, Inggris).

## **2.2 Hipotesis Penelitian & Kerangka Konseptual**

Hipotesis merupakan penjelasan semenstara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi (Erlina dan Mulyani, 2007). Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran sistem *e-office* dalam meningkatkan nilai Transparansi pada Pemerintah Kota Binjai Telah Tercapai.
2. Peran sistem *e-office* dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Binjai Telah Tercapai.

Secara empiris penulis menjelaskan bentuk kerangka konseptual pada gambar 1 dibawah ini:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar diatas, maka dihipotesisnya adalah

1. Bagaimana Penerapan *E'Office* Dalam Meningkatkan Fungsi Transparansi.
2. Bagaimana Penerapan *E'Office* Dalam Meningkatkan Fungsi Akuntabilitas.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kausal (causal), yaitu untuk melihat hubungan beberapa variabel yang belum pasti.

#### 1.1 Populasi dan Sampel

Sumber data dalam penelitian ini adalah 38 orang Kuasa Anggaran yang terdiri dari Ketua Program Studi, Kepala Biro dan Kepala Urusan Pada Universitas Pembangunan Panca Budi ditahun 2019.

#### 1.2 Teknik Analisis Data

Statistik deskriptif umumnya digunakan peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimum dari jawaban yang didapat dari kuisisioner. Selain itu, Dasar Pengambilan keputusan dalam uji chi – square dapat dilakukan dengan melihat nilai output Chi – square test. Dalam pengambilan keputusan akan berpedoman pada nilai Asymp.Sig dengan batas kritis yakni 0,05 dengan melihat nilai chi-square test dengan chi square tabel

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 1. Uji Instrumen Penelitian

Berikut hasil dari Uji Reabilitas dalam penelitian ini.

##### a. Uji Validitas

**Tabel. 4.1 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Butir Instrumen	<i>r</i> Hitung	R Tabel	Ket
E–Budgeting	<i>e-office</i>	0,358	0,320	Valid
	<i>e-office</i>	0,521	0,320	Valid
	<i>e-office</i>	0,544	0,320	Valid
	<i>e-office</i>	0,488	0,320	Valid
	<i>e-office</i>	0,373	0,320	Valid

	<i>e-office</i>	0,488	0,320	Valid
	<i>e-office</i>	0,492	0,320	Valid
Akuntabilitas	Akuntabilitas	0,621	0,320	Valid
	Akuntabilitas	0,352	0,320	Valid
	Akuntabilitas	0,547	0,320	Valid
	Akuntabilitas	0,548	0,320	Valid
	Akuntabilitas	0,540	0,320	Valid
	Akuntabilitas	0,358	0,320	Valid
	Akuntabilitas	0,376	0,320	Valid
	Akuntabilitas	0,485	0,320	Valid
Transparansi	Transparansi	0,004	0,320	Tidak Valid
	Transparansi	0,434	0,320	Valid
	Transparansi	0,233	0,320	Tidak Valid
	Transparansi	0,217	0,320	Tidak Valid
	Transparansi	0,480	0,320	Valid
	Transparansi	0,329	0,320	Valid
	Transparansi	0,336	0,320	Valid
	Transparansi	0,483	0,320	Valid
	Transparansi	0,617	0,320	Valid

Dapat dilihat dari hasil pengujian validitas diatas, maka dapat dilihat bahwa pertanyaan disetiap butir variabel implementasi *e-office* dinyatakan valid, untuk pernyataan butir variabel akuntabilitas semua dinyatakan valid sedangkan pada butir pertanyaan variabel transparansi terdapat 3 (tiga) variabel tidak valid yaitu butir pertanyaan 1, 3 dan 4 sehingga butir pertanyaan tersebut nantinya akan dieleminasi dan tidak digunakan pada olahan data selanjutnya.

#### b. Uji Reabilitas

Berikut hasil dari Uji Reabilitas dalam penelitian ini.

**Tabel. 4.2 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Ket
Implementasi <i>e-office</i>	0,650	0,6	Realibel
Akuntabilitas	0,691	0,6	Realibel
Transparansi	0,695	0,6	Realibel

## 2. Statistik Deskriptif

### a. Statistik Deskriptif Implementasi *e-office*

Adapun Implementasi *e-office* pada Universitas Pembangunan Panca Budi ditampilkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 4.3 Statistik Deskriptif Impelentasi *e-office***  
IMPLEMENTASI E-OFFICE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TELAH TERCAPAI	8	21.1	21.1	21.1
SANGAT TERCAPAI	30	78.9	78.9	100.0
Total	38	100.0	100.0	

Dari tabel diatas, diketahui bahwa sebesar 21,1% responden menyebutkan Impelentasi *e-office* Telah Tercapai Pada Universitas Pembangunan Panca Budi dan

78,9% responden menyatakan Impelentasi *e-office* Sangat Tercapai Pada Universitas Pembangunan Panca Budi.

#### b. Statistik Deskriptif Akuntabilitas

Adapun Statistik Deskriptif Akuntabilitas pada Universitas Pembangunan Panca Budi ditampilkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 4.4 Statistik Deskriptif Akuntabilitas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CUKUP TERCAPAI	15	39.5	39.5	39.5
	TELAH TERCAPAI	23	60.5	60.5	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Dari tabel diatas, diketahui bahwa sebesar 39,5% responden menyebutkan Impelentasi Akuntabilitas Cukup Tercapai Pada Universitas Pembangunan Panca Budi dan 60,5% responden menyatakan Akuntabilitas Telah Tercapai Pada Universitas Pembangunan Panca Budi.

#### c. Statistik Deskriptif Transparansi

Adapun Statistik Deskriptif Transparansi pada Universitas Pembangunan Panca Budi ditampilkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel.4.5 Statistik Deskriptif Transparansi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CUKUP TERCAPAI	4	10.5	10.5	10.5
	TELAH TERCAPAI	32	84.2	84.2	94.7
	SANGAT TERCAPAI	2	5.3	5.3	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Dari tabel diatas, diketahui bahwa sebesar 10,5% responden menyebutkan Impelentasi Transparansi Cukup Tercapai Pada Universitas Pembangunan Panca Budi, 84,2% responden menyatakan Transparansi Telah Tercapai Pada Universitas Pembangunan Panca Budi dan 5,3% responden menyatakan Transparansi Sangat Tercapai Pada Universitas Pembangunan Panca Budi.

### 3. Implementasi *e-office* Dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Implementasi *E-Budgeting* dalam mengingatkan akuntabilitas pada pemerintah di Kota Binjai dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 4.6 Crosstab Implementasi E-Budgeting Dalam Meningkatkan Akuntabilitas**

Count		AKUNTABILITAS		Total
		CUKUP TERCAPAI	TELAH TERCAPAI	
IMPLEMENTASI E-BUDGETING	TELAH TERCAPAI	3	5	8
	SANGAT TERCAPAI	12	18	30
Total		15	23	38

Dari Tabel diatas, diketahui bahwa terdapat 3 (orang) orang Telah Tercapai menerapkan implementasi *e-office* namun Akuntabilitasnya Cukup Tercapai dan terdapat 5 (lima) orang telah tercapai menerapkan implementasi *e-office* dengan Akuntabilitasnya juga telah tercapai.

Selanjutnya, terdapat 12 (dua puluh belas) orang sangat tercapai implementasi *e-office* dengan akuntabilitasnya juga cukup tercapai dan terdapat 18 (delapan belas orang) orang sangat tercapai implementasi *e-office* -Nya dan didukung dengan akuntabilitasnya telah tercapai.

Untuk mengetahui tingkat pengaruhnya antara Implementasi *e-office* terhadap Akuntabilitas dapat diketahui dari uji data Chi Square dibawah ini:

**Tabel 4.7**  
**Uji Chi-Square Implementasi *E-office* Dalam Meningkatkan Akuntabilitas**  
**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.017 <sup>a</sup>	1	.898		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.017	1	.897		
Fisher's Exact Test				1.000	.615
Linear-by-Linear Association	.016	1	.899		
N of Valid Cases <sup>a</sup>	38				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,16.

b. Computed only for a 2x2 table

Pada penjelasan tabel diatas, diketahui bahwa nilai Asump.Sig sebesar 0,898 yang menunjukkan bahwa  $0,898 > 0,05$  artinya tidak ada pengaruh antara Implementasi *e-office* terhadap Akuntabilitas pada Universitas Pembangunan Panca Budi. Selajutnya tingkat keeratan antara Pengaruh Implementasi *e-office* terhadap Akuntabilitas pada Universitas Pembangunan Panca Budi dijabarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.8**  
**(Symmetric Measures) Tingkat Keeratan Implementasi *E-Office* Dalam Meningkatkan Akuntabilitas**  
**Symmetric Measures**

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.021	.898
N of Valid Cases	38	

Pada tabel diatas, diperoleh nilai *contingency Coefficient* sebesar 0,021 yang menunjukkan tingkat keeratan implementasi *e-office* terhadap Akuntabilitas bernilai rendah pada Universitas Pembangunan Panca Budi.

#### 4. Implementasi *E-Office* Dalam Meningkatkan Transparansi

Implementasi *e-office* dalam mengingatkan transparansi pada Universitas Pembangunan Panca Budi dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.9 Implementasi *E-Office* Dalam Meningkatkan Transparansi**

Count		TRANSPARANSI			Total
		CUKUP TERCAPAI	TELAH TERCAPAI	SANGAT TERCAPAI	
IMPLEMENTASI E-BUDGETING	TELAH TERCAPAI	0	8	0	8
	SANGAT TERCAPAI	4	24	2	30
Total		4	32	2	38

Dari Tabel diatas, diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) orang Telah Tercapai menerapkan implementasi *e-office* dan didukung dengan Transparansinya telah tercapai Tercapai. Selanjutnya, terdapat 4 (empat) orang sangat tercapai implementasi *e-office* dengan nilai Transparansinya cukup tercapai. Kemudian terdapat 24 (dua puluh empat) orang sangat tercapai implementasi *e-office* Nya dengan nilai Transparansinya telah tercapai dan terakhir sebanyak 2 (dua) orang sangat tercapai implementasi *e-office* dengan nilai Transparansinya sangat tercapai.

Untuk mengetahui tingkat pengaruhnya antara Implementasi *e-office* terhadap Transparansi dapat diketahui dari uji data Chi Square dibawah ini:

**Tabel. 4.10**  
**Uji Chi-Square Implementasi *e-office* Dalam Meningkatkan Transparansi**

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.900 <sup>a</sup>	2	.387
Likelihood Ratio	3.124	2	.210
Linear-by-Linear Association	.176	1	.675
N of Valid Cases	38		

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42.

Pada penjelasan tabel diatas, diketahui bahwa nilai Asump.Sig sebesar 0,387 yang menunjukkan bahwa  $0,387 > 0,05$  artinya tidak ada pengaruh antara Implementasi *e-office* terhadap Transparansi pada Universitas Pembangunan Panca Budi. Selajutnya tingkat keeratan antara Pengaruh Implementasi *e-office* terhadap Transparansi pada Universitas Pembangunan Panca Budi dijabarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.11**  
**(Symmetric Measures) Tingkat Keeratan Implementasi *e-office* Dalam Meningkatkan Transparansi**

Symmetric Measures			
		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.218	.387
N of Valid Cases		38	

Pada tabel diatas, diperoleh nilai *contingency Coefficient* sebesar 0,218 yang menunjukkan tingkat keeratan implementasi *e-office* terhadap Transparansi bernilai rendah pada Universitas Pembangunan Panca Budi.

## 4.2 PEMBAHASAN

Pada Hakikatnya, suatu sistem dibentuk untuk memudahkan suatu organisasi dalam menjalankan proses pelaksanaan aktivitas organisasinya. Selanjutnya untuk tahapannya, setiap sistem sendiri harus dapat menyesuaikan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dari setiap penggunaanya. Dari hasil penelitian, disebutkan bahwa ketercapaian atau implementasi *e-office* dalam meningkatkan fungsi transparansi dan akuntabilitas sudah tercapai bahkan ada sangat tercapai namun secara hubungan ternyata terdapat tidak pengaruh Implementasi *e-office* dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi. Jadi hal ini dapat dinilai bahwa selama ini penerapan *e-office* di Universitas Pembangunan Panca Budi merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*. Sehingga dalam penelitian ini dapat ditegaskan bahwa *e-office* sudah merupakan salah satu prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* di Lingkungan UNPAB.

Selanjutnya, memang sudah menjadi keharusan saat ini bahwa di era industri 4.0 setiap lembaga/ instansi pemerintah ataupun swasta harus memiliki kendali terhadap operasional dan manajemen pengelolaannya yang berbasis teknologi dengan tujuan agar tingkat resiko kesalahan dan kelalaian yang terjadi dapat diminimalisir atau dihindari.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Peran sistem *e-office* dalam meningkatkan nilai Transparansi pada Universitas Pembangunan Panca Budi telah tercapai.
2. Peran sistem *e-office* dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas pada Universitas Pembangunan Panca Budi telah tercapai.

### 3.2 Saran

1. Agar Universitas Pembangunan Panca Budi agar terus dapat meningkatkan fungsi dan mengupdate informasi dari e-office untuk seluruh aspek kebutuhan pada Program Studi, Biro dan Lembaga yang ada di Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Agar Universitas Pembangunan Panca Budi perlu terus melakukan proses monitoring evaluasi secara berkala dalam menguatkan hasil dari harapan pelaksanaan penerapan sistem *e-office* sebagai upaya penguatan komponen penilaian akreditasi baik di program studi dan universitas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2011. "*Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- K. Tachjar, Nani., dan Sutarno., 2011, Sistem Informasi e-Office sebagai Pendukung Kegiatan Sistem Informasi Pendayagunaan Aparatur Negara, Digital Potpourri, Jakarta
- Krina, P. 2003. *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi. Jakarta : Sekretariat Good Publik Governance*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo.2004. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Suatu Sarana Good Governance
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Prayudha, 2012, Penarapan E-Office Dalam Hubungan Antara Front Office dan Back Office di PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Indonesia.
- Rudyanto Arief, Muhammad., 2005, Sistem e-Office untuk Mendukung Komunikasi, Koordinasi dan Alokasi Sumber Daya, Naskah Publikasi, Yogyakarta
- Sa'adah, Binti. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E – Government (Studi Tentang Penganggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Bilitar).
- Stanza, Dwindy., 2010, Analisis dan Perancangan E-Office Berbasis Web pada Bagian HUMAS STIMIK AMIKOM Yogyakarta, Naskah Publikasi, Yogyakarta.
- Toha, Suherman.2007. Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha. Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Umar, Husein, 2008, *Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan.*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Waluyo, D.E.. 2000, Teknologi Perkantoran Modren: Wacana Tentang Kantor Maya. Pengembangan Alat dan Lab Jurusan Administrasi Niaga", Semarang, Politeknik Negeri Semarang
- Whicker, Marcia Lynn. 2002, *Federal Deficit and Financing the National Debt. In: Handbool of Fiscal Policy*. New York: Marcel Dekker Inc.